

TAJUK RENCANA

Menegakkan Komitmen Bersih Negeri dari Korupsi

BEBERAPA hari ini daftar klase- men liga korupsi Indonesia beredar melekat di media sosial. Istilah yang muncul pascaterkuaknya kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang oleh pejabat PT Pertamina Patra Niaga. Jika beberapa waktu kasus korupsi PT Timah berada di puncak, dalam klase- men liga korupsi posisinya sudah digeser. Kini posisi lima puncak diduduki korupsi Pertamina yang angkanya mencapai Rp 968,5 triliun. Disusul korupsi PT Timah Rp 300 triliun, kasus BLBI Rp 138 triliun, Duta Palma di angka Rp 78 triliun dan PT TPPI Rp 37 triliun. Selanjutnya ada PT Asabri, Jiwa Sraya, Kemensos dan seterusnya.

Istilah klase- men sejatinya digunakan dalam dunia olahraga sepak- bola, untuk memperingkat klub ber- dasar perolehan skor. Namun ne- tizen Indonesia yang terkenal kreatif telah menggunakan istilah Klase- men Liga Korupsi Indonesia yang berisi 12 peringkat kasus kor- upsi dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Dan kasus Bank Century di era SBY yang dulu sangat menghebohkan karena menyeret nama-nama orang besar, kini berada di posisi bontot dalam Liga Klase- men Koru- psi Indonesia, di angka Rp 7 triliun.

Berapapun dan bagaimanapun, meruaknya kasus-kasus megakor- upsi yang menghantam Indonesia sungguh menghenyakkan banyak pihak. Terkait kasus mutakhir, untuk memperjelas Komisi VI DPR akan memanggil Pertamina pada 12 Maret mendatang. Mengapa baru minggu kedua? Menurut Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade kar- rena Komisi XII sudah memanggil dan mereka sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Sehingga diberi ruang untuk mereka melaku- kan jawaban. Tentu Komisi VI seba- gai mitra akan memanggil. (KR, 1/3)

Inikah ironi, di negeri Pancasila? Negeri dimana kasus-kasus korupsi terus tumbuh subur bak cendawan di musim hujan? Satu persatu kas- sus terungkap dengan kerugian ne- gara yang di luar nalar, di tengah ne- gara harus mengencangkan ikat pinggang dengan mengorbankan banyak anggaran untuk program krusial dan vital. Bahkan di tengah

rakyat yang tidak sepenuhnya se- jahtra apalagi diterpa kasus-kasus PHK.

Fakta yang tidak dapat dibiarkan. Realita ini mengingatkan kembali akan kalimat Bung Karno : "Per- juanganku lebih mudah karena melawan penjahat. Namun perju- angan kalian akan lebih sulit, karena melawan bangsa sendiri." Sang Proklamator telah memprediksi bahwa ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia setelah merdeka adalah pelbagai masalah bangsa. Dan perjuangan untuk melawannya juga tidak akan mudah.

Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi bang- sa. Di sini, sinyal Ir Soekarno bahwa melawan bangsa sendiri nemukan jawabnya. Karena kor- upsi dilakukan anak bangsa sendiri dan merongrong negara. Ibarat pe- nyakit, korupsi adalah kanker dalam stadium empat, sudah akut dan ha- nya dapat dilakukan dengan am- putasi. Upaya mengamputasinya adalah jangan menjadikan korupsi sebagai budaya. Sebab kalau bu- daya akan ada pemikiran perlu dilestarikan dan diajarkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu harus di- lakukan.

Saat ini, sinyal terus diberikan Presiden Prabowo untuk menindak koruptor tanpa pandang bulu. Lang- kah tegas Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus men- jadi momentum penegakan hukum di negeri ini. Bahkan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD saat ber- bicara di Universitas Slamet Riyadi Solo (27/2) menangkap, terkait kas- sus Pertamina, Kejaksaan Agung ti- dak akan seberani itu tanpa izin presiden.

Artinya? Komitmen bersih-bersih negeri dari korupsi kian menemu- kan momentumnya. Hanya apakah bangsa ini benar-benar konsisten untuk menyelamatkan uang ne- gara? Semua kembali kepada penegakan hukum. Rakyat pasti mau, hukum seberat-beratnya para koruptor, miskinkan mereka, sita asetnya. Jadi bukan sekadar pengungkapan kasus dan kerugian ne- gara dan kemudian menguap entah kemana ceritanya. Apalagi sekadar menambah daftar panjang Klase- men Liga Korupsi Indonesia. □f

Bank Syariah, Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat



LAHIRNYA ekonomi syariah disebabkan dua faktor. Pertama, ajaran agama yang melarang ri- ba dan menganjur- kan shadaqah. Kedua, timbulnya surplus dollar dari negara-negara penghasil dan pengeksport minyak dari Timur Tengah dan negara-negara Islam di mana mereka pada akhirnya membutuhkan institusi keuangan Islam untuk menyimpan dana mere- ka.

Di Indonesia ekonomi syariah mulai dikenal sejak lokomo- tifnya berdiri yaitu Bank Syariah, dalam hal ini adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Dalam perjalanan waktu, Bank Syariah ternyata bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat yang saat itu masih mengalami krisis ekono- mi, baik sebelum maupun sesu- dah tahun 1998. Perubahan luar biasa mulai berproses, di mana nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi & selu- ruh aspek spiritual menjiwai se- mua kegiatan bisnis/transaksi ekonomi masyarakat.

Secara alamiah ekosistem ekonomi syariah mulai terbentuk. Lambat laun ekosistem ekonomi syariah berjalan inklusif men- jadi satu pilar baru untuk meng- kokohkan ekonomi nasional yang kuat dan adil. Ekosistem ini melibatkan berbagai sektor, seperti industri ke- uangan syariah, industri sektor riil ha- lal, lembaga kajian syariah dan ter- tatanya regulasi keuangan syariah yang inklusif. Elemen-elemen ekosis- tem ekonomi syariah mulai terbentuk dan tersistemisasi antara lain ; Produk keuangan syariah (Tabungan syariah, deposito syariah, rahn, giro syariah, dan pembiayaan syariah), Pembiayaan Pembangunan (Pembia- yaan pemerintah melalui Obligasi Syariah / ORIS dan pembiayaan swasta melalui penerbitan Sukuk), Wakaf (Instrumen yang dapat mening- katkan basis pembentukan

Hanan Wihasto

barang modal), dan lain-lainnya sepe- ti Pariwisata Halal, Hotel / Penginapan Syariah, Industri Kuliner Halal dan se- mua Sektor Bisnis yang Berbasis Syariah.

Dari sisi Lembaga Keuangan Syariah yang meliputi Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah (Rahn), Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Syariah, Permodalan Ventura, Anjak Piutang, Koperasi Syariah / BMT dan



KR-JOKO SANTOSO

Lembaga Keuangan Mikro Syariah mulai bergerak dan tumbuh secara or- ganic dengan berbagai dinamikanya. Di sini tampak sekali, bahwa Bank Syariah muncul sebagai lokomotif uta- ma ekonomi syariah. Karena itu kega- galan bank syariah bisa dibaca sebagai kegagalan ekonomi syariah.

Produk dan jasa bank syariah telah digali dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang baku. Para bankir syariah dituntut untuk ino- vatif. Mereka tidak boleh terpaku pa- da produk-produk bank konvensional. Kesadaran penuh harus dimiliki oleh bankir syariah, bahwa tidak selalu pro- duk dan jasa yang ada di bank konve- nisional diadopsi di bank syariah. Sesungguhnya produk dan jasa bank syariah mesti digali dari dalam sendiri dan dikembangkan secara kreatif

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa tersebut dapat membuka dan inklusif, namun tanpa menyimpang dari prin- sip syariah. Kreativitas terhadap ragam produk yang ditawarkan Bank Syariah juga menjadi tantangan tersendiri.

Mengapa masyarakat heterogen dan pluralis mulai melirik sistem keuan- gan syariah, antara lain karena pasar keuangan syariah sangat potensial ke- handalannya dan saat ini mulai muncul kesadaran kolektif masyara- kat untuk berperilaku bisnis berda- sarkan *value* (jujur, transparan, adil dan bertanggungjawab). Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati masyarakat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia. Munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah yang tum- buh bak jamur di musim hujan, menyemarakkan dinamika pe- ekonoman wong cilik. Bayang- kan, rentenir mulai resah dengan hadirnya BMT dan Koperasi Sya- riah di pasar-pasar tradisional. Sektor riil bergulir, masyarakat terbantu, BMT bersinergi dengan Bank Syariah, mengucurkan dananya langsung ke masyara- kat, dan keduanya hadir mende- sak rentenir, judi online dan pin- jaman online pada sudut-sudut sempit semesta. □f

***) Hanan Wihasto SE MM, Dosen Tetap IBS STEI Yogyakarta, Praktisi 30 Tahun Di Perbankan (13 Tahun Di Bank Syariah), Anggota ISEI DIY.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima- kasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa me- nampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Awan Gelap Belanja Negara



AWAL tahun lalu Presiden Prabowo mengin- struksikan efisiensi belanja negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efi- siensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun 2025, penghematan anggaran belanja negara ditargetkan sebesar Rp 306.695.177.420.000 (306,7 triliun). Target penghematan belanja negara ini diperoleh dari pemangkasan an- ggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256.100.000.000 (256,1 tirlun) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50.595.177.420.000 (50,6 triliun). Awan gelap sontak bergelayut di atas kantor-kantor pemerintahan pusat dan seantero daerah di Indonesia.

Penghematan belanja negara sebe- narnya tidak hanya di Indonesia. Argentina dipimpin Presiden Javier Milei, sukses berhemat sampai me- mangkas jumlah kementerian dan me- nekan angka inflasi 200 persen. Pre- sident Donald Trump (Amerika Serikat) pun menirunya, sampai mengajak Elon Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan membubarkan USAID. Pemerintah Vietnam dan Pakistan berhemat juga dengan memangkas jumlah kemente- rian. Kebijakan Presiden Prabowo san- gat berbeda, menambah jumlah ke- menterian dan pejabat negara terlebih dahulu, memerintahkan penghematan belanja negara kemudian.

Kebijakan efisiensi anggaran ini penting dianalisis secara cermat, tentu dari sisi pandang alternatif dan kepe- ntingan politik anggaran publik di pusat maupun daerah. Pertama, kebijakan yang membuka kotak pandora politik anggaran. Terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 yang diikuti penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/- Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, justru membuka kotak pandora politik alokasi APBN selama ini. Kebijakan Menteri Keuangan yang menyasar 16 item belanja ini menan- dakan, kemauan pemerintah melam- pau kemauan publik. Sering para pe-

Sunaji Zamroni

giat advokasi kebijakan dan anggaran negara menyuarakan program/kegiat- an dan anggaran untuk kelompok rentan dan marginal. Suara pegiat ini mewakili kemauan publik (kelompok rentan, miskin, marginal), namun se- ring membentur tembok teknokrasi yang dibangun kokoh oleh para birokrat. Walhasil, sering kemauan pu- blik ini bertepuk sebelah tangan. Padahal, belanja negara banyak digu- nakan untuk membiayai ihwal urusan birokrasi yang sangat bisa dikurangi atau ditiadakan, seperti; membiayai ATK, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan seterusnya. Keputusan Menteri Keuangan ini membuka kotak pandora, bahwa anggaran belanja ne- gara masih boros dan belum sepenuh- nya memihak kepentingan publik.

Kedua, efek domino penghematan belanja negara. Pemerintah RI se- benarnya "bagai makan buah simalaka- ma" dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo. Informasi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut potensi kehilangan penda- patan industri perhotelan sebesar Rp 24,5 trlun akibat kebijakan efisiensi belanja negara. PHRI menghitung 40 % pangsa pasarnya berasal dari belan- ja negara, terutama hotel-hotel- hotel berbintang 3, 4, 5. Betapa besarnya efek langsung yang akan dialami industri per- hotelan, termasuk efek domi- no yang akan menimpa para pekerja hotel maupun pelaku usaha turunan yang terkait dengan usaha jasa perhotelan. Nasib perhotelan ini memberikan "simalakama" bagi aparatut pemerin- tah, bahkan para kepala daerah yang baru saja dilan- tik pun tak lepas dari keluhan "sepinya order" yang dirasakan para penge- lola hotel. Penghematan 45 % dari kegiatan seminar, rap- at, dan sejenisnya, serta di- pangkasnya 53,9 % belanja perjalanan dinas pemerintah pusat, sungguh berefek domino pada industri per-

hotelan dan turunannya. Efek domino lainnya juga mengintai pelaku UM- KM, baik usaha jasa, pangan olahan, ATK maupun sektor lainnya. Terba- yang akan kian kalut efek dominonya, ketika para pelaku UMKM ini telah menjalin "hubungan gelap" dengan pa- rakum birokrat yang sering melaku- kan "transaksi ijon" dalam pengada- an barang dan jasa pemerintah.

Ketiga, buyarnya janji politik Pe- milukada 2024. Kebijakan presiden ini mempersempit ruang politik anggaran daerah, awan gelap kepala daerah terlantik untuk menuaikan janji politiknya. Memang Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran agar daerah melakukan perubahan RKPd 2025 dan APBD 2025. Namun, perubahan yang akan dilakukan harus tunduk pada Inpres No 1/2025. Bagi yang memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) me- nukupi, janji politik bisa segera ditu- naikan. Namun buyarlah janji politik bagi daerah yang rasio PAD-nya me- rah. Walhasil, kebijakan ini melahir- kan awan gelap dan bagaikan makan buah simalakama. □f

***) Sunaji Zamroni, Analis Kebijakan di UNU Yogyakarta dan Alterasi Indonesia, Ketua Dewan Nasional FITRA, Pegiat Lakpesdam PCNU Bantul.**

Pojok KR

Menteri BUMN akan revisi total Pertamina

-- Perombakan besar-besaran? ***

Setelah 58 tahun, PT Sritex tutup -- Sejarah akan mencatat tekstil kita pernah jaya ***

Ekonomi-bisnis, sektor lemah seba- gian masyarakat Indonesia -- Perlu penanaman jiwa wiraswasta sejak dini

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisariss Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoek Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolo- m (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Per- wakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP